

# KEWENANGAN TNI AL DALAM PELAKSANAAN YURISDIKSI PENJUALAN BBM OLEH KAPAL ASING DI ZEEI

**Heryuda**

Staf Ahli Pangarmatim Koarmatim  
Jl. Jakarta (Tanjung Perak), Surabaya  
Email: heri.yuda@yahoo.com

## ***Abstract***

*The writing of this journal is about the authority of the Indonesian Navy to conduct law enforcement regarding fuel sales by foreign-flagged vessels in the exclusive economic zone of Indonesia. Because there is not clear and definite arrangement and procedure to handle this activity, the author considers that, this issue raises doubts in the law enforcement in the area of the Indonesia exclusive economic zone. The author is trying to analyze the existing problems viewed from national and international laws in order to obtain legal certainty in dealing with a fuel sales criminal offense by foreign vessels in the Indonesian exclusive economic zone. This writing method normative legal writing approach Statute and concept. Of this paper will writing the analysis results authority of the Indonesia navy to conduct law enforcement regarding fuel sales by foreign-flagged vessels in the exclusive economic zone of Indonesia.*

**Key words:** Authority, Indonesian Navy, Fuel sale, Foreign flagged vessels, Exlcusive Economic Zone.

## **Abstrak**

Penulisan jurnal ini membahas tentang kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas dan pasti dalam hukum nasional Indonesia tentang kegiatan ini maka penulis beranggapan permasalahan ini menimbulkan keragu-raguan dalam penegakan hukum di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari permasalahan yang ada penulis mencoba menganalisa di hadapan dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku guna mendapat kepastian hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Adapun tujuan penulis mengangkat topik masalah ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan tentara nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis kewenangan TNI-AL dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

**Kata kunci:** kewenangan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, penjualan bahan bakar minyak, kapal berbendera asing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

### **Latar Belakang**

Dunia masa kini tidak luput dari ancaman dan tantangan yang serius dan tidak dapat diatasi oleh hanya satu negara saja, ancaman berupa ancaman sosial dan ekonomi, konflik antar negara, konflik internal, terorisme, senjata nuklir dan biokimia, serta kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Untuk menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keamanan bersama secara multilateral dengan diantisipasi dengan konvensi PBB menentang tindak pidana terorganisasi atau konvensi Palermo tahun 2000 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi<sup>1</sup> yang telah di ratifikasi dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.<sup>2</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.<sup>3</sup> Sebagai negara kepulauan menurut konvensi PBB tentang hukum laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982 yang telah diratifikasi oleh Undang-undang nomor 17 tahun 1985 Tentang pengesahan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut<sup>4</sup>. Sesuai dengan pasal 46. Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang di tutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang di sebut perairan kepulauan, serta memiliki

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, **Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013, hlm. 324.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960 Tahun 2009.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Nomor 177 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925 Tahun 2008.

<sup>4</sup> Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1985 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319 Tahun 1985.

laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 48 konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut.

Indonesia menggabungkan zona-zona maritim ini secara bersamaan dalam satu istilah yang di sebut perairan Indonesia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1996<sup>5</sup> tentang perairan Indonesia pada pasal 4 disebutkan Indonesia mempunyai kedaulatan di perairan Indonesia dimana wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia. Dengan adanya pembatasan itu secara jelas Indonesia tidak memiliki kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Pembatasan penunjukan wilayah kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan/pantai hanya mempunyai hak berdaulat dilandas kontinen sesuai dengan pasal 77 dan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai pasal 56.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 dalam UNCLOS 1982 tersebut ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, dalam pasal 57 konvensi hukum laut 1982 bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut di ukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.<sup>6</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah di implementasikan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1983<sup>7</sup> yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya hayati laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia<sup>8</sup>. Namun pada saat ini telah terjadi permasalahan hukum di zona ekonomi eksklusif diluar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati. Terutama *illegal fueling* yang berkaitan dengan

<sup>5</sup> Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1996 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 Tahun 1996.

<sup>6</sup> Nur Yanto, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 30.

<sup>7</sup> Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1983 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3266 Tahun 1983.

<sup>8</sup> Dina Sunyowati, **Buku Ajar Hukum Laut**, Unair, Surabaya, 2013, hlm. 14.

*illegal fishing* dilakukan secara teorganisir dan internasional<sup>9</sup>. Selain itu yang dapat di katagorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan internasional untuk menentukan hal tersebut di ketahui dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan dari pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing, dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia<sup>10</sup> sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap dan menahan dan menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut. Tugas untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan negara Indonesia dilaut terutama diwilayah perairan dan wilayah yurisdiksi<sup>11</sup> dinyatakan secara tegas pada pasal 9 huruf b Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas “menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukun internasional yang telah disertifikasi” sedangkan pasal 14 Undang-Undang nomer 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyebutkan aparaturnya penegak hukum dibidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan dan penegakan hukum merupakan penjabaran tugas yang diemban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dilaut yang bertugas untuk menjaga integritas wilayah Republik Indonesia dan mempertahankan stabilitas keamanan dilaut serta melindungi sumber daya alam dilaut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Yang telah dijabarkan dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur materi pokok antara lain : penegakkan kedaulatan, penegakan hukum dan keamanan laut, tugas diplomasi, pembangunan dan pengembangan matra laut, dan pemberdayaan wilayah

---

<sup>9</sup> Susanto, **Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 26.

<sup>10</sup> Anis Widyawati, **Hukum Pidana Internasional**, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 44.

<sup>11</sup> Pasal 7 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang **Kelautan**.

pertahanan laut. Yang bertujuan guna mewujudkan peningkatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam kegiatan penegakan hukum di laut yurisdiksi khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif telah terjadi perubahan dinamika bentuk kejahatan transnasional di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diluar dari jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh konvensi perserikatan bangsa-bangsa, khususnya tentang tindak pidana penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing dikawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, permasalahan ini menimbulkan keragu-raguan oleh petugas penegak hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiakarna tindak kejahatan tersebut diluar jangkauan hukum nasional dan internasional sehingga masalah ini belum dapat diatasi secara tuntas oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Adapun permasalahan yang diajukan untuk mengkaji dalam penelitian ini adalah :Apakah kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Kapal berbendera asing dikawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia?

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian secara yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisa menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum,<sup>12</sup> Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan konsep.<sup>13</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan hal ini dimaksudkan bahwa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Revka Petra Media, Surabaya, 2010, hlm. 71.

<sup>13</sup> Mukti fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 185.

Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak sebagai analisis penelitian hukum karena akan banyak muncul konsep di dalam fakta hukum berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Yang terdiri dari undang-undang bahan hukum primer tersebut :

1. *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982.
2. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime(UNCATOC)* 2000
3. Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konfrensi hukum laut
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi
5. Undang-undang nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
6. Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia.
7. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
8. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan
9. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
10. Undang –undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
11. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang.hukum bahan yang mempertegas analisa hukum atas asas dan prinsip hukum, bahan hukum sekunder terutama pandangan-pandangan para sarjana mempunyai kualifikasi yang tinggi dan buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.<sup>15</sup>Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 183.

hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan kepada peneliti semacam petunjuk untuk penulisannya.<sup>16</sup>

Sumber bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, dan lain-lain. Untuk menunjang penulisan jurnal ini penulis menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan konvensi-konvensi tentang hukum internasional karena mempunyai otoritas tertinggi dikarenakan merupakan perjanjian antar Negara,<sup>17</sup> serta buku-buku transkrip yang berhubungan dengan hukum internasional, hukum pidana internasional, hukum laut internasional, dan teori – teori hukum adapun langkah yang dilakukan antar lain pengutipan langsung atau melalui penafsiran penulis dan menyimpulkan informasi dari bahan hukum.

Setelah bahan terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan jalan mengklarifikasikan bahan-bahan yang ada sesuai dengan urutan masalah yang diteliti, sedangkan bahan hukum yang tidak relevan disisihkan agar analisisnya dapat difokuskan pada bahan-bahan yang relevan. Pengolahan bahan dilaksanakan dengan mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan melakukan seleksi terhadap bahan hukum kemudian menyusun hasil penelitian secara sistematis menurut penggolongan bahan hukum tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>18</sup>

## **Pembahasan**

Kedaulatan dalam suatu pengertian bahwa bangsa dalam satu negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya asalkan kegiatan/kebijaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional kedaulatan sering juga diartikan sebagai suatu yang

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 196.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 209.

<sup>18</sup> Mukti Fajar, *Op.cit.*, hlm. 181.

bersifat instrumental yang diperlukan guna melindungi masyarakat untuk membangun tertib sosial, berdaulat dan kekuatan. Kedaulatan dalam konsep politik mempunyai arti sebagai kekuasaan politik tertinggi dan tidak ada sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi dalam membuat dan melaksanakan urusan politik. Dalam konteks internasional kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara benar.<sup>19</sup> Kedaulatan adalah nilai dari suatu negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan global. Contohnya seperti kedaulatan perekonomian, kedaulatan pertahanan dan keamanan negara. Terkadang kedaulatan tidak bisa dengan tegas diimplementasikan oleh suatu negara karena terkait dengan persoalan global yang menjadikan urusan negara interdependensi dengan negara lain.<sup>20</sup> Pada dasarnya kedaulatan mempunyai empat sifat dasar :

1. Permanen yang berarti kedaulatan tetap selama negara tetap berdiri.
2. Asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat, tidak dapat dibagi – bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu – satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.
4. Tak terbatas, yang berarti kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun sebab apabila kedaulatan negara terbatas, tentu ciri kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

Kedaulatan sebagai istilah kenegaraan timbul pada abad ke-enam oleh Jean Bodin sebagaimana dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, kedaulatan adalah kekuasaan absolut dan berlangsung terus – menerus maksudnya kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam satu negara yang tidak boleh dibatasi oleh konstitusi tetapi boleh oleh hukum Ilahi dan hukum alamiah, kedaulatan ialah piranti dalam tangan seorang raja dalam bentukan monarki atau berada dalam genggam tangan rakyat dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.<sup>21</sup> Jean Charpentier sebagaimana dikutip oleh Boer Mona menyatakan bahwa kedaulatan juga

---

<sup>19</sup> Saru Arifin, **Hukum Perbatasan Darat Antar Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27.

<sup>20</sup> Saru Arifin, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>21</sup> Mahendra Putra Kurnia, **Hukum dan Kewilayahan**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 26.



mempunyai pengertian negatif dan positif, pengertian negatif mengandung makna kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum internasional yang mempunyai status lebih tinggi. Kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan darimanapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Pengertian positif mengandung makna kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber – sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber – sumber kekayaan alam. Dalam beberapa persoalan kedaulatan negara ini yang sering disebut sebagai penyebab terjadinya konflik atau sengketa antar negara satu dengan negara lainnya dalam artian oleh karena banyaknya jumlah negara sering terjadi pertentangan dalam penerapan masing – masing yurisdiksi oleh negara – negara. Suatu identitas politik dikatakan sebagai negara tentunya harus memiliki kedaulatan baik secara eksternal maupun internal. Pengertian dari kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara – negara lain. Kelanjutan dari prinsip kebersamaan antar negara – negara mengakibatkan negara tersebut memiliki : (1) sebuah yurisdiksi atas wilayahnya dan warga yang mendiaminya, (2) kewajiban bagi negara – negara lain untuk tidak ikut campur tangan atas persoalan yang terjadi di wilayah negara lain, (3) kewajiban – kewajiban yang diakibatkan oleh hukum kebiasaan dan perjanjian internasional didasarkan pada kehendak negara – negara itu sendiri. Sedangkan mengenai pengertian kedaulatan secara internal bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang ditentukan ke dalam wilayah hukum dari negara – negara yang bersangkutan dan direalisasikan dalam bentuk (1) Hukum, (2) Mendapat ketundukan, (3) Memutus persoalan – persoalan yang timbul dalam yurisdiksinya.<sup>22</sup> Menurut Boer Mauna kedaulatan ialah kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan kebebasan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu :

---

<sup>22</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 28.

1. Aspek Ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok – kelompok lain tanpa tekanan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek Intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga – lembaganya, cara kerja lembaga – lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang – undang yang diinginkan serta tindakan – tindakan untuk mematuhinya.
3. Aspek Teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu – individu dan benda – benda yang terdapat diwilayah tersebut.<sup>23</sup>

Di samping itu dengan adanya wilayah, negara dapat menegajawantahkan kedaulatannya melalui salah satunya, penerapan aturan sekaligus mengefektifkan sangsi dari aturan tersebut. Disini kita lihat adanya korelasi yang jelas antara kedaulatan, wilayah dan negara sehingga tanpa adanya wilayah subjek hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara.<sup>24</sup> Wilayah dalam konsep hukum internasional merupakan sentral bagi peneguhan eksistensi dari sebuah negara dalam menjalankan kedaulatannya. Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas – luasnya baik kedalam maupun keluar, namun demikian tetap harus memperhatikan hukum internasional serta sopan santun dalam pergaulan internasional lainnya sebagian negara berdaulat dapat menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi kekuasaan kedalam maupun keluar, mengatur hubungan dengan warga negaranya, mengatur penggunaan *public domain*, membuat undang – undang dasar beserta peraturan pelaksanaannya, mengatur politik luar negeri maupun dalam negeri termasuk warga negara asing yang ada diwilayahnya walaupun tidak mempunyai kewarganegaraan, mengatur wilayah darat, wilayah laut maupun wilayah udara untuk kepentingan pertahanan, keamanan dan keselamatan umum.<sup>25</sup> Prinsip yang mengatakan bahwa wilayah (*teritory*) dalam suatu negara terdiri dari tiga dimensi yaitu wilayah daratan (*land*

---

<sup>23</sup> Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 24.

<sup>24</sup> Jawahir Thontowi, **Hukum Internasional Kontemporer**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 177.

<sup>25</sup> Saru Arifin, *Op.cit.*, hlm. 39.

*territory*), Wilayah perairan (*water territory*), dan wilayah udara (*air territory*). Dimana menurut I Wayan Parthiana yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia yang menyatakan bagian – bagian wilayah negara meliputi :

1. Wilayah daratan termasuk tanah didalamnya : wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah dibawah daratan tersebut. Wilayah daratan antara negara yang satu dengan yang lainnya haruslah tegas batas – batasnya. Pada umumnya garis batas wilayah daratan ditetapkan berdasarkan perjanjian – perjanjian garis batas wilayah antara negara – negara yang berbatasan. Adapula garis batas wilayah antara dua negara berupa sungai yang mengalir diperbatasan wilayah negara – negara yang bersangkutan dalam hal demikian maka garis batas wilayah antar kedua negara pada tengah – tengah aliran sungai tersebut atau dapat pula garis batas wilayah pada sungai tersebut ditetapkan pada bagian – bagian terdalam dari aliran sungai. Kedaulatan negara atas tanah dibawah wilayah daratannya sampai pada kedalaman yang tidak terbatas, meliputi juga sumber – sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah perairan adalah wilayah perairan teritorial yang merupakan wilayah suatu negara yang termasuk kedalam laut atau perairan dibawah kedaulatan, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Disamping itu juga ada pula bagian perairan laut yang tidak merupakan bagian wilayah negara jadi tidak tunduk pada kedaulatan negara misalnya laut lepas.
3. Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan, wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.
4. Wilayah ruang udara adalah ruang udara yang merupakan bagian dari wilayah negara yaitu ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah

daratan dan diatas permukaan wilayah perairan. Sedangkan mengenai batas luar dari ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara hingga kini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional berbagai teori pernah dikemukakan untuk menjawab permasalahan batas maupun luasnya kedaulatan negara diruang udara.<sup>26</sup>

Bentuk wilayah negara Indonesia menurut Wallace, Rebecca M. yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, berdasarkan teorinya termasuk *divided or separated* yaitu negara yang terpisah oleh wilayah laut dan atau sepotong oleh negara lain (negara yang wilayahnya dibagi – bagi atau dipisah – pisahkan/daratan – daratannya dipisah – pisahkan oleh perairan.<sup>27</sup> Dalam undang – undang RI nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara pada pasal 1 angka 1 mendefinisikan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Dan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi daratan, lautan dan udara.

UNCLOS 1982 menyebutkan negara kepulauan atau negara pantai mempunyai kedaulatan diperairan pedalamaan, perairan kepulauan dan laun teritorialnya tercantum pada pasal 2 dan pasal 49 UNCLOS. Indonesia menggabungkan zona – zona maritim ini dalam suatu istilah yang disebut perairan Indonesia. Berdasarkan undang – undang nomor 6 tentang perairan Indonesia pada pasal 4 menyebutkan Indonesia mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) di perairan Indonesia, dimana wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia. Dengan adanya pembatasan itu secara jelas Indonesia tidak mempunyai kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia ataupun ditempat lain selain perairan Indonesia. Pembatasan penunjukan wilayah kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam UNCLOS sebagai negara pantai/kepulauan hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) di landas kontinen sesuai pasal 77

<sup>26</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 22.

<sup>27</sup> Mahendra Putra Kurnia, *Op.cit.*, hlm. 21.

dan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai pasal 56 .UNCLOS memformulasikan secara berbeda antara perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial termasuk hak yang dimiliki oleh negara lain dimasing – masing perairan itu. Akan tetapi Indonesia memformulasikan ketiga jenis perairan/laut itu sama yaitu sebagai perairan Indonesia. Pendekatan ini dapat dipahami bila dilihat dari sifat kedaulatan yang ada di ketiga perairan yaitu negara pantai/kepulauan (dalam hal Indonesia) mempunyai kedaulatan atas ketiga jenis perairan laut itu sesuai pasal 3 Undang – undang nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.<sup>28</sup> Akan tetapi bila kita cermati lebih jauh tingkat kedaulatan dari masing – masing jenis perairan atau laut berbeda, perbedaan tingkat kedaulatan itu antara lain di perairan pedalaman Indonesia sesuai pasal 7 Undang – undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan pedalaman terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat tidak mengenal adanya hak negara lain, sedangkan perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia harus mengakomodasi kepentingan negara lain dalam bentuk pelayaran dan penerbangan.

Sedangkan untuk zona ekonomi eksklusif Indonesia yang pengaturannya tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi hukum laut tahun 1982 dimana rezim hukum laut negara kepulauan telah mendapat pengakuan secara internasional. Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara lain, dalam mengelola perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber daya alam tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
2. Melindungi kepentingan negara pantai untuk di bidang kelestarian lingkungan serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber alam di zona tersebut.

---

<sup>28</sup> Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1996 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 Tahun 1996.

Pengaruh zona ekonomi eksklusif sampai jarak maksimum yang ditetapkan oleh konvensi hukum laut PBB 1982 pada bab V pasal 57 tidak melebihi 200 mil laut dari garis pantai dari mana lebar laut teritorial di ukur.<sup>29</sup>

Negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat bukan kedaulatan sesuai ketentuan pasal 58 konvensi hukum laut PBB 1982 yang menyatakan bahwa di zona ekonomi eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut dan juga untuk penggunaan sah lainnya, aspek-aspek kebebasan di laut lepas juga berlaku di zona ekonomi eksklusif.<sup>30</sup> Dengan adanya sinkronisasi antara hukum nasional Indonesia dengan konfrensi hukum laut 1982 tentang zona ekonomi eksklusif maka Indonesia dapat mengklaim lebar zona ekonomi eksklusif sampai 200 mil laut dan negara-negara lain harus menghormati, menghargai, dan mengakui, karena ini sudah suatu kesepakatan bersama dalam hubungan dengan masyarakat internasional.<sup>31</sup>

Kewenangan dapat diartikan adalah suatu kebebasan, kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu badan yang melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas pihak lain dan kewenangan ini adalah pengejawantahan atau implementasi dari suatu kedaulatan.<sup>32</sup> Negara Indonesia sebagai negara pantai dan negara kepulauan kewenangannya telah tercantum dalam UNCLOS 1982 dalam pasal 24 tentang kewajiban negara pantai yaitu:

1. Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut territorial kecuali sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Dalam penerapan konvensi ini atau setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai konvensi ini negara pantai khususnya tidak akan:
  - a. Menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai, atau

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo, **hukum laut Indonesia**, Rineka cipta, Jakarta, 2005 , hlm. 63

<sup>30</sup> Heru Prijanto, **Hukum laut internasional**, Bayu media publishing, Malang, 2007, hlm. 11-12

<sup>31</sup> Nur Yanto, *Op.cit* hlm. 37

<sup>32</sup> Munir Fuady, **Teori – Teori Besar Dalam Hukum**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 92

- b. Mengadakan diskriminasi atau diskriminasi nyata terhadap kapal negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atasnama negara manapun.
2. Negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya.<sup>33</sup>

Sedangkan untuk hak perlindungan negara pantai sudah tercantum pada UNCLOS 1982 dimana pasal 25 menyatakan :

1. Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
2. Dalam hak kapal menuju perairan pedalaman atau singgah disuatu fasilitas pelabuhan diluar perairan pedalaman negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian.
3. Negara pantai tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata diantara kapal asing, dapat menanggukkan sementara kedalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penanggukan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penanggukan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Untuk kewenangan negara Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah laut berdaulat yaitu Zona Ekonomi Eksklusif harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan-ketentuan dari UNCLOS 1982 dimana kewajiban-kewajiban ini berlaku umum bagi negara pantai dan negara kepulauan yang tercantum pada pasal 56 pada konvensi yang mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi Zona Ekonomi tersebut seperti

---

<sup>33</sup> BABINKUM TNI, **Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)**, Jakarta, 2012, hlm. 21.

<sup>34</sup> BABINKUM TNI, *Op.cit.*, hlm. 23.

produksi energy dari air, arus dan angin.<sup>35</sup> Sedangkan kewajiban dari negara di zona ini semua negara baik negara berpantai menikmati dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel-kabel pipa bawah laut. Negara tak berpantai berdasarkan prinsip keadilan yang sama, negara tak berpantai juga diberi hak untuk mengambil kekayaan di Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur pada pasal 69 konvensi laut selanjutnya dalam pelaksanaan hak berdaulat tersebut negara pantai juga sebagaimana yang telah ditetapkan pasal 73 konvensi laut 1982. Negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, seperti pemeriksaan, pengangkatan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai, dengan demikian hak-hak berdaulat negara pantai tidak hanya sekedar hak saja tapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.<sup>36</sup>

Kedaulatan negara dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negara yang bersangkutan antara lain wewenang negara untuk membuat peraturan hukum. Demikian juga untuk penegakkan hukum dilaut oleh negara diimplementasikan oleh aparat negara yang bertugas diwilayah laut sesuai hukum nasional negara yang bersangkutan. Secara universal Angkatan Laut mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionel, dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan Angkatan Laut. Peran polisionel dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum dilaut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dilaut serta mendukung pembangunan bangsa.<sup>37</sup> Didalam Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan tugas kepada TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan dilaut sebagaimana tercantum pada pasal 9 yaitu :

1. Melaksanakan tugas TNI Matra Laut dibidang pertahanan.

---

<sup>35</sup> Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 364

<sup>36</sup> Krisno Bintoro, *Op.cit*, hlm. 363

<sup>37</sup> Mabes TNI AL, **Protap Gakum TNI AL**, ( Jakarta, 2009 ), hlm. 3



2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan diwilayah laut yuridiki nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Adapun kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik berdasarkan undang-undang terhadap tindak pidana khusus dilaut:

1. Tindak pidana sesuai TZMKO Stbl. No. 442 Tahun 1939 kualifikasi tindak pidana melakukan pengintaian atau survey hidrografi perairan Indonesia, menggambar atau memotret lingkungan maritim, mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan lingkungan maritim. TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 13 ayat 1 (TZMKO). Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan.
2. Tindak pidana perompakan (KUHP dan UNCLOS 1982) kualifikasi tindak pidana pembajakan dilaut lepas, pembajakan dipantai, pembajakan disungai, nahkoda bekerja sebagai menganjurkan melakukan pembajakan, menyerahkan kapal untuk dibajak, penumpang merampas kapal, nahkoda melarikan kapal dari pemiliknya, bekerja sebagai nahkoda atau ABK kapal yang digunakan untuk pembajak. TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 14 TZMKO Jo. Pasal 110 UNCLOS 1982. Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan.
3. Tindak pidana Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Undang-undang nomor 5 tahun 1983), kualifikasi tindak pidana tanpa ijin melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam, tanpa ijin membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi atau bangunan lainnya, tanpa ijin melakukan kegiatan penelitian ilmiah, tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan atau tercemarnya lingkungan hidup, merusak atau

memusnahkan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-undang nomor 5 Tahun 1983. Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.

4. Tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistimnya (Undang-undang nomor 5 tahun 1990) kualifikasi tindak pidana perbuatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia. Mengangkat, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, megangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati. TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1990. Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.
5. Tindak pidana tentang perikanan undang-undang nomor 31 dan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, kualifikasi tindak pidana menangkap ikan dengan bahan kimia, memiliki, menguasai alat penangkap ikan yang mengganggu merusak keberlanjutan sumber daya ikan, membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan atau kesehatan manusia, merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, tidak memiliki SIUP, tidak memiliki SIPI, kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI tidak membawa SIPI asli, tidak memiliki SIKPI, memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI tidak memiliki SPB. TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 73 ayat 2 Undang-undang nomor 45 Tahun 2009. Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.

6. Tindakan pidana pelayaran undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kualifikasi tindak pidana pelanggaran kapal asing beroperasi diwilayah perairan Indonesia, angkutan laut khusus tanpa izin, angkutan laut tanpa izin, pelanggaran asuransi, pengangkutan bahan berbahaya tanpa izin, kegiatan bongkar muat tanpa izin diluar pelabuhan, penggunaan terminal khusus tanpa izin, tentang kelaikan kapal, tentang pemeliharaan kapal, tentang perangkat komunikasi kapal, tindakan nahkoda membahayakan kapal, mempekerjakan awak kapal tanpa kualifikasi, tentang pencemaran lingkungan, tindak pidana dibidang pelayaran oleh korporasi, TNI Angkatan Laut berwenang sebagai penyidik berdasarkan pasal 282 ayat 1 dan penjelasan Undang-undang nomor 17 Tahun 2008. Tindakan yang diambil pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.
7. Tindak pidana wilayah negara undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, kualifikasi tindak pidana wilayah negara, menghilangkan merusak, mengubah atau memindahkan tanda-tanda batas negara atau melakukan pengurangan wilayah negara. Menghilangkan, merusak, merubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.<sup>38</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia sudah membuat undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Dan pada pasal 13 undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan : dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan penegak hukum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Eksklusif Indonesia, meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

---

<sup>38</sup> Mabes TNI AL, **Protap Gakum TNI AL**, Jakarta, 2009, hlm. 10-32.

2. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
3. Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.<sup>39</sup>

Mengenai aparat penegak hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dibidang penyidikan tentang pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif sesuai apa yang ada pada ketentuan pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1983 dinyatakan aparat penegak hukum dibidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mengenai penegakan hukum pasal 13 undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menetapkan bahwa untuk pelaksanaan hal-hal hak-hak berdaulat, hak-hak lain yuridiksi dan kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal 4 ayat (1)<sup>40</sup> undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air diatasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
- b. Yuridiksi yang berhubungan dengan :
  1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.
  2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan.
  3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

---

<sup>39</sup> Nur Yanto, *Op.cit.*, hlm. 107.

<sup>40</sup> Dikdik Mohamad Sodik, **Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 99

Untuk tindak pidana penjualan bahan bakar minyak (BBM) oleh kapal berbendera asing diperairan zona ekonomi eksklusif, merupakan tindak kejahatan diluar ketentuan dari undang-undang nomor 5 tahun 1983.Kejahatan ini dilaksanakan oleh kapal-kapal berbendera asing yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran baik nasional maupun internasional.<sup>41</sup> Jika tindak pidana penjualan bahan bakar minyak (BBM) merupakan pelanggaran terhadap peraturan tentang pertambangan/migas, jika kita mengkaji undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara pada pasal 149 ayat (1) yang menyatakan : “ Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat lainnya pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.<sup>42</sup> Sehingga dapat kita simpulkan terhadap tindak pidana dibidang pertambangan, mineral dan batu bara sesuai undang-undang negara, TNI Angkatan Laut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tindak pidana penjualan BBM oleh kapal asing dikawasan zona ekonomi eksklusif jika dihadapkan tindak pidana bidang kepabeanean yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanean jika dimaksud terhadap pelanggaran kepabeanean terkait dengan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannnya yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah PPNS Bea dan Cukai. TNI Angkatan Laut tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik dalam hal tindak pidana kepabeanean.

Undang-undang nomor 4 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan undang-undang nomor 17 tentang kepabeanean hanya berlaku di laut territorial tidak berlaku di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam hal tindak pidana penjualan BBM di zona ekonomi eksklusif tidak dapat melakukan penangkapan dan penyidikansehingga TNI Angkatan Laut tidak mempunyai kewenangan untuk memproses dalam peradilan. Terhadap kegiatan illegal tersebut,dikarenakan tindak pidana tersebut terjadi dilaut jika ditinjau dari aspek efektifitas dan efisiensi

---

<sup>41</sup> Susanto, **Komando dan Pengendalian Keamanan dan Kelamatan laut berbasis sistem peringatan Dini**,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 138

<sup>42</sup> Indonesia Legal Center Publishing, **Peraturan Perundangan Pertambangan**, Karya Gemilang, Jakarta, 2014, hlm. 187

maka kewenangan penyidikan kepada TNI Angkatan Laut dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepadanya hal ini sesuai prinsip penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka berikut ini penulis akan menguraikan inti dari penelitian dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut sebagai alat negara merupakan pengejawantahan dari kewenangan negara dilaut yang juga implementasi dari kedaulatan negara atas wilayah sangat dipengaruhi oleh hukum nasional dan hukum internasional yang dikaitkan dengan rezim-rezim hukum zona maritim, untuk kewenangan TNI Angkatan Laut dalam tindak kejahatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh kapal berbendera asing dikawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia masih diluar jangkauan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, sehingga sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas tentang kejahatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh kapal berbendera asing oleh TNI Angkatan Laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, 2014, **Hukum Pidana Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boer Mauna, 2012, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung.
- Dikdik Mohamad Sodik, 2012, **Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia**, Revika Aditama, Bandung.
- Dina Sunyowati, 2013, **Buku Ajar Hukum Laut**, Airlangga University Press, Surabaya.
- Heru Prijanto, 2007, **Hukum laut internasional**, Bayu Media Publishing, Malang.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2014, **Peraturan Perundangan Pertambangan**, Karya Gemilang, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2003, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung.
- Jawahir Thontowi, 2013, **Hukum Internasional Kontemporer**, Refika Aditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2010, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Revka Petra Media, Suarabaya.
- Krisno Bintoro, 2012, **Alur Laut Kepulauan Indonesia**, SESKOAL, Jakarta.
- Mahendra Putra Kurnia, 2011, **Hukum dan Kewilayahan**, UB Press, Malang.
- Mukti Fajar, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013, **Teori-teori Besar Dalam Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Nur Yanto, 2014, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2005, **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Grup, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2013, **Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Saru Arifin, 2014, **Hukum Perbatasan Darat Antar Negara**, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, 2015, **Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) 2000.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Internasional**.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang **Pengesahan Konfrensi Hukum Laut**.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia**.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang **wilayah Negara**.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang **Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi**.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang **Kelautan**.